

KLB virus polio jenis cVDPV2 di Indonesia

Laporan Situasi no. 13–10 Juli 2023

Respons KLB:

- [Koordinasi dan perencanaan](#)
- [Surveilans](#)
- [Respons imunisasi](#)
- [Advokasi, perubahan perilaku sosial, dan komunikasi risiko](#)

Rangkuman

Konfirmasi KLB:

- Jumlah total kasus AFP dengan cVDPV2: 4
- Jumlah total anak sehat dengan cVDPV2: 11 (4 di Aceh dan 7 di Jawa Barat)
- Tingkat KLB: 2

Provinsi dan kabupaten/kota terdampak:

- Provinsi Aceh: 1 kasus dengan kelumpuhan di Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara dan Kab. Bireuen
- Provinsi Jawa Barat: 1 kasus dengan kelumpuhan di Kab. Purwakarta

Kasus indeks:

- Sumber: Kasus AFP
- Lokasi: Kec. Mane, Kab. Pidie.
- Onset kelumpuhan: 9 Oktober 2022
- Jenis kelamin: Laki-laki
- Usia: 7 tahun
- Status vaksinasi: 0 dosis

Kasus terbaru (berdasarkan tanggal onset):

- Sumber: Kasus AFP
- Lokasi: Kec. Maniis, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat
- Onset kelumpuhan 16 Februari 2023
- Jenis kelamin: Perempuan
- Usia: 4 tahun
- Status vaksinasi: 0 dosis

Respons KLB:

- Provinsi Aceh: Semua anak usia 0 hingga di bawah 13 tahun
- Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat: Semua anak usia di bawah 5 tahun
- Sasaran: 6.5 juta anak
- Jenis vaksin: nOPV2

Crash program:

- Sumatra Barat dan Riau: Semua anak di bawah 5 tahun (0-59 bulan: bOPV dan 4-59 bulan: IPV)

Distribusi kasus cVDPV2 di Indonesia dalam 12 bulan terakhir



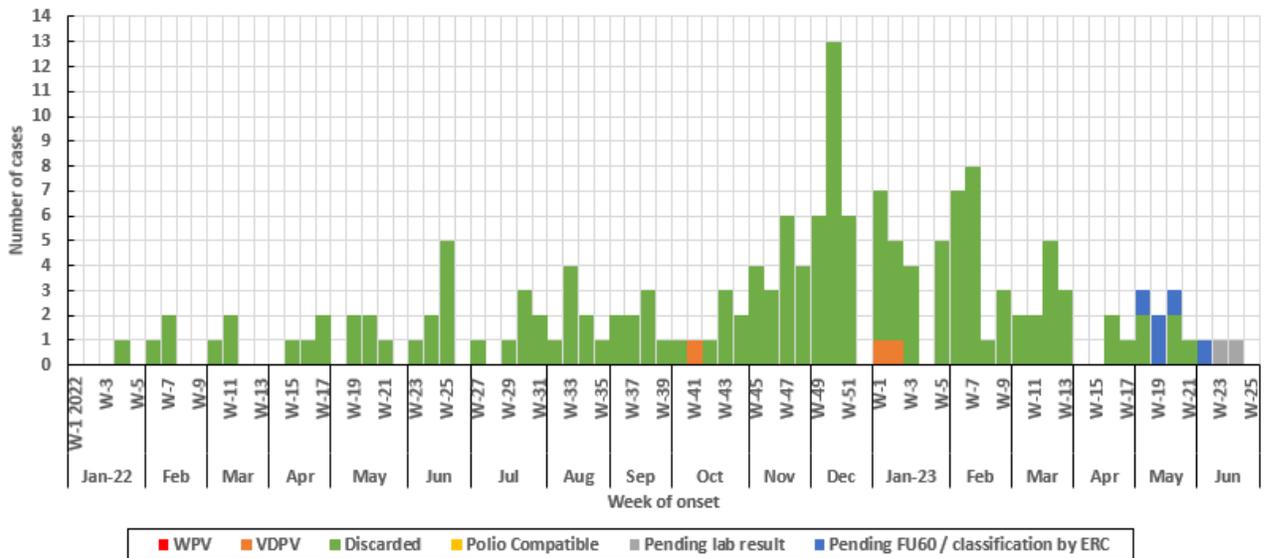
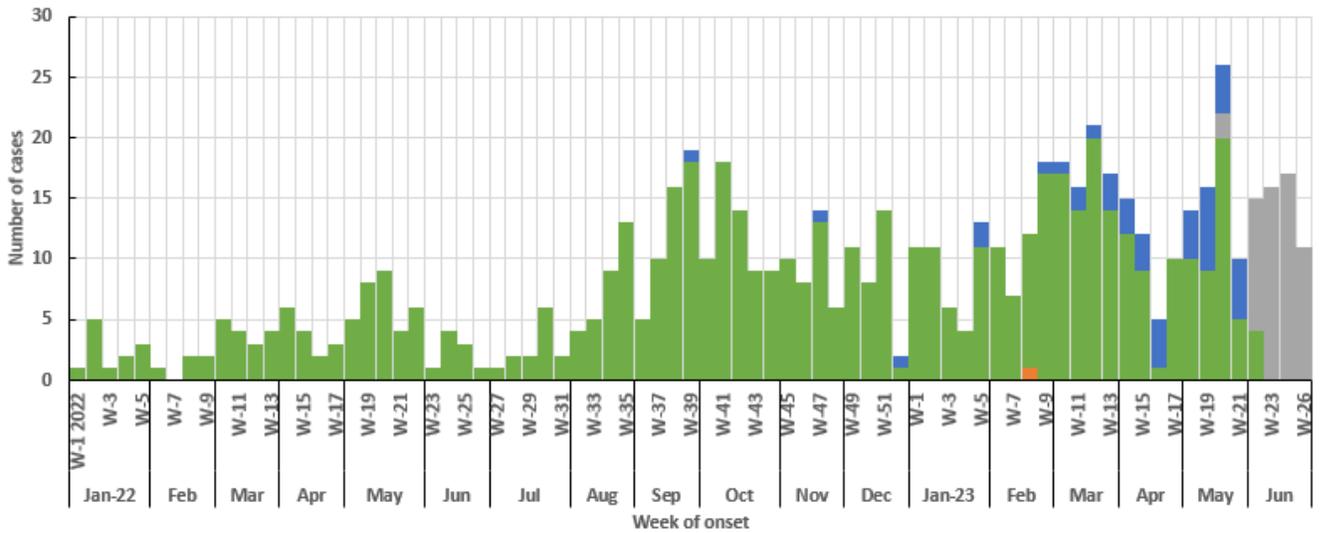
Gambar 1. Lokasi cVDPV2 di Provinsi Aceh dan Jawa Barat, Indonesia

Sorotan utama

- Pada 2 dan 3 Juli, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengadakan pertemuan persiapan penilaian respons kejadian luar biasa (KLB) atau *outbreak response assessment* (OBRA), yang melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Aceh, Jawa Barat, dan Sumatra Utara serta mitra-mitra. Tindak lanjut kegiatan ini adalah data dan dokumen laporan difinalisasi, diunggah, proses penilaian perlu dipersiapkan, dan menunjuk tim yang akan terlibat dalam wawancara OBRA.
- Pada 23 Juni 2023, Kemenkes, World Health Organization (WHO), dan UNICEF mengadakan pertemuan sosialisasi tentang rencana kegiatan OBRA dan persiapan dinkes provinsi dan semua dinkes kabupaten/kota di Aceh dan Jawa Barat. WHO dan UNICEF mengingatkan dinkes provinsi dan kabupaten/kota tentang pentingnya kelengkapan dokumen. Salah satu tindak lanjut yang disepakati adalah memfinalisasi penghitungan dan mengunggah semua dokumen lengkap terkait vaksin nOPV2 untuk kegiatan respons KLB. Selanjutnya, pada 26 Juni WHO dan UNICEF mandampingidinkes provinsi dan dinkes kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mengadakan pertemuan *desk review* untuk memvalidasi cakupan sub-Pekan Imunisasi Nasional (sub-PIN) pada putaran pertama dan kedua serta data logistik. Dalam pertemuan ini, tim menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan vaksin dan kelengkapan dokumentasi.
- Kemenkes mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan input data ke sistem data elektronik Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK), persiapan dokumen OBRA, dan penyelesaian laporan pengelolaan vaksin nOPV2 di semua tingkat (dinkes provinsi, dinkes kabupaten/kota, dan puskesmas).

Situasi terkini

- Seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun dari Desa Mane, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh mengalami AFP dengan onset kelumpuhan pada 9 Oktober 2022. Anak ini tidak memiliki riwayat perjalanan dan belum menerima vaksin polio, baik vaksin polio inaktivasi (*inactivated polio vaccine/IPV*) maupun vaksin polio oral (*oral polio vaccine/OPV*). Konfirmasi laboratorium virus polio jenis VDPV2 didapatkan pada 12 November 2022. Hasil sekuensing genetik menunjukkan VDPV2 dengan 25 perubahan nukleotida. Hasil sekuensing genom utuh masih belum tersedia. Pemeriksaan imunoglobulin kuantitatif menunjukkan bahwa anak ini imunokompeten. Di kecamatan yang sama, 32 sampel tinja dari anak-anak sehat di area sekitar yang bukan merupakan kontak kasus dikumpulkan dan dites virus polio. Empat spesimen positif VDPV2, dengan 25–26 perubahan nukleotida pada regio protein virus 1 (VP1).
- Kasus kedua dilaporkan dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Seorang anak laki-laki berusia tiga tahun dari Desa Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye mengalami AFP dengan onset kelumpuhan pada 3 Januari 2023. Anak ini tidak memiliki riwayat perjalanan dan belum pernah menerima vaksin polio (IPV maupun OPV) dari imunisasi rutin tetapi menerima vaksin nOPV2 pada 13 Desember 2022. Konfirmasi laboratorium didapat pada tanggal 26 Januari 2023. Hasil sekuensing genom menunjukkan VDPV2 dengan 27 perubahan nukleotida. Hasil sekuensing genom utuh masih belum tersedia. Hasil pemeriksaan imunoglobulin kuantitatif juga belum tersedia.
- Kasus ketiga dilaporkan dari Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Seorang anak laki-laki berusia empat tahun dari Desa Meunasah Keutapang, Kecamatan Jeunieb mengalami AFP dengan onset kelumpuhan pada 13 Januari 2023. Anak ini tidak memiliki riwayat perjalanan dan belum pernah menerima vaksin polio (IPV maupun OPV) dari imunisasi rutin tetapi menerima vaksin nOPV2 pada 6 Desember 2022 dalam putaran pertama sub-PIN. Konfirmasi laboratorium didapat pada tanggal 7 Februari 2023. Hasil sekuensing genetik menunjukkan cVDPV2 dengan 34 perubahan nukleotida. Hasil sekuensing genom utuh masih belum tersedia. Hasil pemeriksaan imunoglobulin kuantitatif juga belum tersedia.
- Kasus keempat dilaporkan dari Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Seorang anak perempuan berusia empat tahun dari Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis mengalami AFP dengan onset kelumpuhan pada 16 Februari 2023. Anak ini tidak memiliki riwayat perjalanan dan belum pernah menerima vaksin polio (IPV maupun OPV) dari imunisasi rutin. Hasil sekuensing genetik menunjukkan cVDPV2 dengan 30 dan 31 perubahan nukleotida. Hasil sekuensing genom utuh masih belum tersedia. Hasil pemeriksaan imunoglobulin kuantitatif juga belum tersedia. Setelah diidentifikasinya kasus terbaru di Jawa Barat ini, investigasi lapangan dijalankan, mencakup pengambilan dan analisis 30 sampel tinja dari anak-anak sehat di area sekitar yang bukan merupakan kontak kasus tersebut. Tujuh sampel positif virus polio.
- Berdasarkan pemeriksaan United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta, Kemenkes melaporkan bahwa VDPV2 yang diidentifikasi di Kabupaten Pidie tidak memiliki hubungan genetik dengan VDPV2 yang sebelumnya telah disekuens dan akan diidentifikasi sebagai INO-ACE-1. Hasil positif dari anak-anak sehat juga telah diperiksa dan memiliki hubungan genetik dengan INO-ACE-1. Dengan demikian, virus polio tipe 2 ini diklasifikasi sebagai cVDPV2.



Gambar 2. Klasifikasi kasus AFP di Jawa Barat (atas) dan di Aceh (bawah), pada periode minggu 1 2022 hingga minggu 24 2023 per 30 Juni 2023

Respons KLB

Koordinasi dan perencanaan

Sumatra Utara

Pada 20 Juni, WHO dan UNICEF mendampingi Kemenkes dan Dinkes Provinsi Sumatra Utara mengadakan rapat koordinasi untuk persiapan OBRA bersama dinkes provinsi dan 33 dinkes kabupaten/kota. Pertemuan ini dihadiri oleh kepala pencegahan dan pengendalian penyakit, kepala unit surveilans, petugas kesehatan lingkungan, petugas farmasi, dan petugas promosi kesehatan. UNICEF mendukung dinkes provinsi dan kabupaten/kota dalam mempersiapkan dokumen-dokumen, khususnya terkait pengelolaan vaksin nOPV2 dan mobilisasi sosial.

Riau

Pada 19 Juni, Dinkes Provinsi Riau dan Dinkes Kota Pekanbaru bersama WHO mengadakan pertemuan kajian imunisasi rutin, yang dihadiri 61 peserta yang terdiri dari kepala, koordinator imunisasi puskesmas, dan staf rumah sakit Cakupan imunisasi rutin dievaluasi dari data manual dan elektronik, khususnya cakupan OPV dan IPVserta dipaparkan

introduksi IPV2 tingkat nasional pada 21 Juni 2023. Disamping itu, WHO menyampaikan materi *job aids* bagi para peserta, yang menggambarkan program imunisasi sesuai pedoman, termasuk imunisasi kejar.

Surveilans

Sumatra Utara

Surveilans lingkungan dilakukan secara berkala di Sumatra Utara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam upaya pemberantasan polio. surveilans lingkungan dikatakan memiliki performa yang baik apabila menemukan setidaknya 50% enterovirus dari sampel yang diperiksa. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Cemara di Kota Medan ditunjuk sebagai tempat Pengambilan sampel lingkungan di provinsi ini. Pada 2023, empat sampel surveilans lingkungan diambil setiap bulan sejak Januari, dan semuanya ditemukan enterovirus. Selain itu, tiga spesimen terbaru pada bulan Februari hingga April juga positif virus polio nOPV2. Hal ini memang diperkirakan terjadi karena sub-PIN sebagai respons terhadap KLB polio di Aceh mulai dijalankan dari 13 Februari hingga 14 April 2023.

Riau

Pada 22 Juni, Kemenkes dan Dinkes Provinsi Riau mengadakan pertemuan *desk review* surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang dihadiri 36 peserta meliputi tim surveilans dan perwakilan rumah sakit dari 12 kabupaten/kota. Dinkes Provinsi Riau mengevaluasi kinerja surveilans, termasuk surveilans lumpuh layuh atau *acute flaccid paralysis* (AFP) dan campak, serta mengevaluasi sistem kewaspadaan dini dan respons (SKDR), sedangkan Kemenkes memaparkan topik PD3I dan pengemasan spesimen. WHO berkontribusi dalam diskusi ini dan memberikan informasi terbaru terkait : kajian data rumah sakit, persyaratan tim surveilans di rumah sakit, manajemen spesimen AFP, penentuan kasus AFP, kegiatan yang dapat dikolaborasi dengan lintas program di Puskesmas seperti nutrisi dan promosi kesehatan untuk meningkatkan temuan kasus PD3I, dan pengisian formulir PD3I. Kegiatan yang serupa diadakan oleh Dinkes Kota Pekanbaru pada 21 Juni, dengan dihadiri 40 petugas surveilans dan laboratorium dari semua puskesmas.



Gambar 3. Pertemuan *desk review* di Kota Pekanbaru, Riau. Kredit: Dinkes Kota Pekanbaru

Sumatra Barat

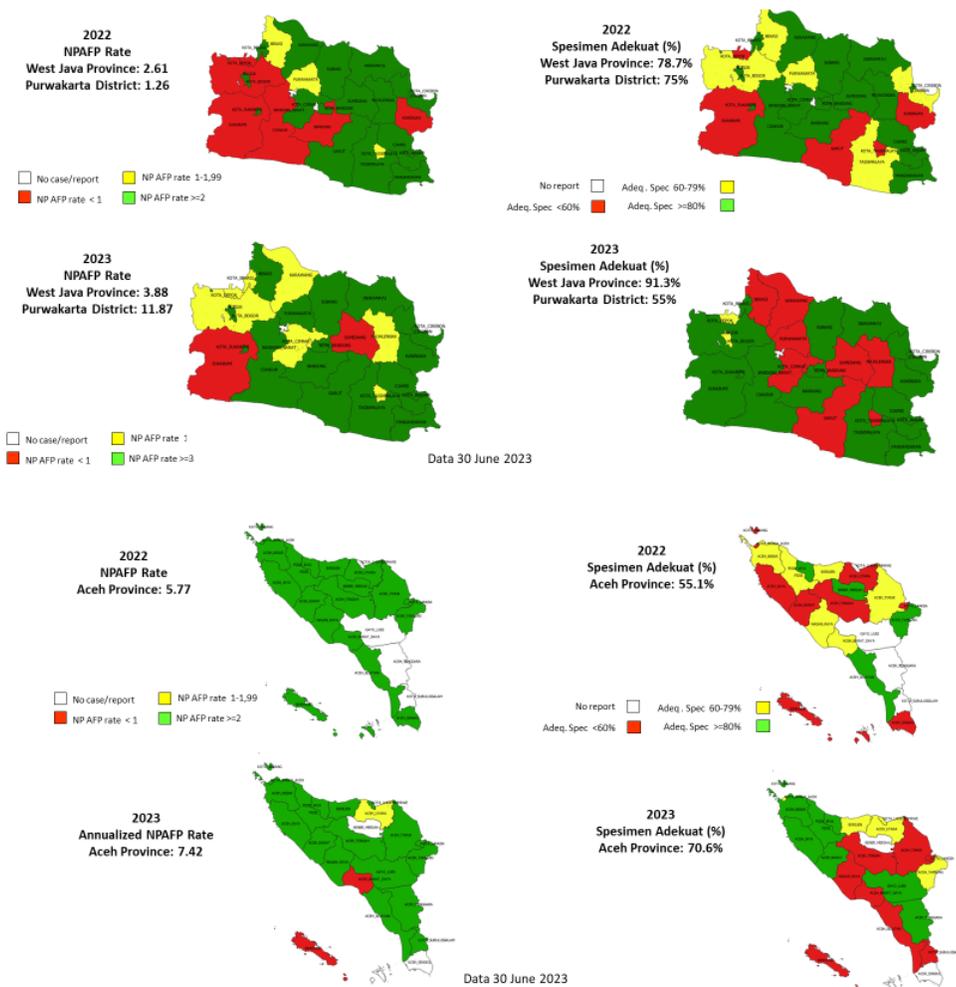
Pada 15 Juni, WHO mendampingi Dinkes Kota Solok Selatan mengadakan pelatihan surveilans PD3I untuk petugas surveilans dari delapan puskesmas. Kota Solok Selatan adalah salah satu *silent district*¹, yang tidak melaporkan satu pun kasus AFP selama dua tahun. Para peserta membahas bagaimana kinerja surveilans AFP dapat ditingkatkan. WHO menjelaskan strategi-strategi peningkatan surveilans berbasis komunitas dan rumah sakit untuk mendeteksi kasus AFP.

¹ *Silent district* adalah kab/kota, area, atau entitas administratif lain yang belum melaporkan satu pun kasus AFP selama periode antara 6 hingga 12 bulan atau lebih.



Gambar 4. Pelatihan surveilans PD3I di Kota Solok Selatan, Sumatra Barat. Kredit: WHO/Novi Anggraeni

Pada 2022, angka AFP bukan polio (NP-AFP) di Aceh adalah 5,77 per 100.000 penduduk di bawah usia 15 tahun dengan spesimen adekuat 55%. Per 30 Juni 2023, Aceh melaporkan 68 kasus AFP dari 21 kabupaten/kota dengan angka NP-AFP disetahunkan 7,42 per 100.000 penduduk di bawah usia 15 tahun dengan spesimen adekuat 70% meskipun masih terdapat dua *silent district*, yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Bener Meriah. Di Jawa Barat, angka NP-AFP adalah 2,62 per 100.000 penduduk di bawah usia 15 tahun, dengan angka spesimen adekuat 78,9% pada 2022. Ada satu *silent district*, yaitu Kota Cimahi. Pada 2023, Jawa Barat melaporkan 332 kasus AFP dari 27 kabupaten/kota, dengan angka NP-AFP disetahunkan 3,63 per 100.000 penduduk di bawah usia 15 tahun dan spesimen adekuat 80,3%.



Gambar 5. Angka NP-AFP dan spesimen adekuat di Jawa Barat (atas) dan Aceh (bawah)

Respons imunisasi

Sumatra Utara

Pada 23 Juni, WHO mendampingi Dinkes Provinsi Sumatra Utara dan Dinkes Kota Binjai dalam menjalankan penilaian cepat rapid convenience assessment (RCA) putaran kedua sub-PIN polio di Puskesmas Tanah Tinggi. Tim mengunjungi dua desa, Tanah Tinggi dan Timbang Langkat, dan melakukan kunjungan rumah ke rumah yang mencakup sebanyak 40 rumah tangga. Dalam penilaian RCA ini, tim mengidentifikasi 55 anak yang tergolong dalam kelompok sasaran di mana 94,5% di antaranya telah menerima dosis pertama dan 83,6% dosis kedua nOPV2. Sebagai tindak lanjut, Puskesmas Tanah Tinggi mencatat anak-anak yang masih memerlukan dosis kedua nOPV2.

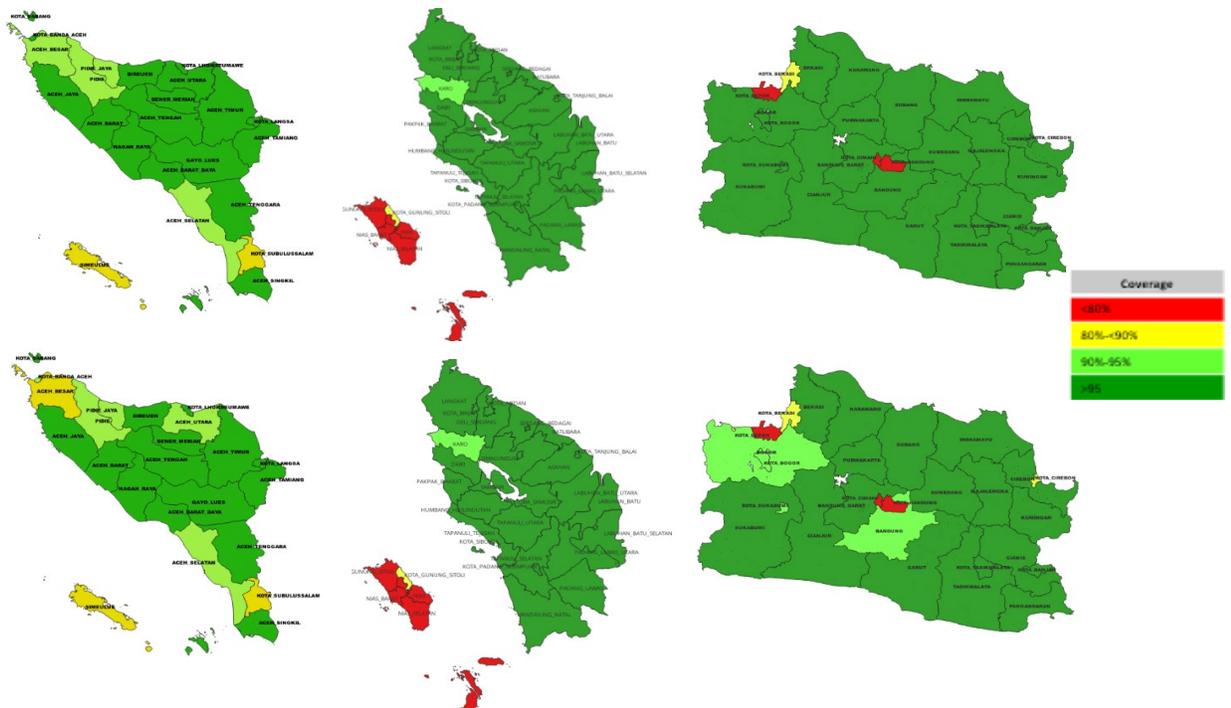


Gambar 6. RCA di Puskesmas Tanah Tinggi, Kota Binjai, Sumatra Utara. Kredit: WHO/Candora Aronta Tambunan

- Semua kegiatan sub-PIN telah selesai dilaksanakan di semua provinsi. Per 23 Juni, 12.416.088 dosis nOPV2 telah diberikan selama sub-PIN polio di Aceh, Sumatra Utara, dan Jawa Barat. Di Aceh, 1.180.322 dari 1.217.939 (96,9%) anak menerima nOPV2 pada putaran pertama, dan 1.153.413 (94,7%) di putaran kedua. Di Sumatra Utara, 1.294.171 dari 1.346.655 (96,1%) menerima nOPV2 pada putaran pertama dan 1.276.852 (94,8%) di putaran kedua. Di Jawa Barat, 3.834.634 dari 3.984.797 (96,2%) anak menerima nOPV2 pada putaran pertama dan 3.676.799 (92,3%) di putaran kedua.

Putaran pertama

Putaran kedua



Gambar 7. Cakupan sub-PIN polio di Aceh (kiri), Sumatra Utara (tengah), dan Jawa Barat (kanan)

Logistik

- Pada 27 Juni 2023, UNICEF dan UNDP mendampingi dinkes provinsi dan dinkes-dinkes kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam mengadakan *desk review* tentang vaksin dan logistik setelah selesainya putaran kedua respons KLB polio. Dalam pertemuan ini, semua dinkes kabupaten/kota diminta mengompilasi data cakupan, alokasi vaksin, vial terpakai, vial tidak terpakai, dan vial tersisa. UNICEF juga mengingatkan dinkes provinsi dan kabupaten/kota untuk melengkapi serta mengunggah semua dokumen yang diperlukan untuk kegiatan OBRA pada bulan Juli.
- Kantor lapangan UNICEF Aceh melanjutkan dukungan dalam rangkaian pelatihan pengelolaan vaksin untuk staf puskesmas pada 21-22 Juni. Pelatihan ini dihadiri oleh para pengelola imunisasi, pengelola rantai dingin, dan staf farmasi dari semua puskesmas di Banda Aceh dan Meulaboh. Para fasilitator dalam pelatihan ini merupakan petugas-petugas dari UNICEF, dinkes provinsi, dan dinkes kabupaten/kota. Bagian ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF dalam memperkuat kapasitas pengelolaan vaksin tenaga kesehatan di tingkat puskesmas.



Gambar 8 . Pelatihan pengelolaan vaksin untuk staf puskesmas di Banda Aceh (kiri) dan Meulaboh (kanan). Kredit: UNICEF/Dita

- Pada 17 dan 18 Juni, Dinkes Provinsi Jawa Barat mengadakan pertemuan evaluasi respons KLB polio di Kota Bandung. Dalam pertemuan evaluasi ini, UNICEF menekankan kembali pentingnya sistem pembukuan dan dokumentasi dalam pengelolaan vaksin nOPV2.



Gambar 9. Pertemuan evaluasi respons KLB polio di Provinsi Jawa Barat. Kredit: UNICEF/Sugiarto

Mobilisasi dukungan

Kemenkes

- Kemenkes terus memantau dan mengevaluasi implementasi respons KLB polio di Aceh dan Jawa Barat. Respons diperluas ke provinsi-provinsi yang berdekatan dengan Aceh yaitu Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat.
- Kemenkes memberikan umpan balik berkala terkait sub-PIN polio dan informasi surveilans terbaru.

WHO

- WHO menugaskan staf nasional ke Aceh, Sumatra Utara, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Riau serta staf internasional ke Aceh dan Jawa Barat untuk semakin mendukung respons KLB polio. Dukungan para petugas ini berfokus pada bantuan teknis terkait mobilisasi vaksin, penilaian, advokasi, surveilans, pemantauan kualitas data, pemeriksaan dan pengiriman spesimen laboratorium, serta pembangunan kapasitas tenaga kesehatan.

UNICEF

- UNICEF memberikan dukungan teknis dengan fokus utama pada imunisasi, advokasi, komunikasi pembangunan, dan pengelolaan vaksin di Aceh, Jawa Barat, dan Sumatra Utara. Dukungan ini diberikan oleh staf nasional dan staf lapangan.

ROTARY

- Dukungan Rotary meliputi partisipasi aktif dalam kampanye-kampanye sub-PIN polio melalui upaya mobilisasi sosial seperti pembagian spanduk, balon, dan kaos; kunjungan masyarakat; dan penyediaan transportasi dan perawatan untuk anak-anak dengan cVDPV2.

Isu-isu utama

- Pelaporan vaksin harus ditingkatkan dan diselaraskan, dan pengelolaan tepat terhadap ampul nOPV2 terbuka harus dipastikan. Semua ampul yang tersisa atau rusak atau dipindahkan ke fasilitas tingkat lebih tinggi, harus sesuai pedoman manajemen vaksin nOPV2
- Untuk mempersiapkan pelaksanaan OBRA, diharapkan agar respons KLB dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur, dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipastikan oleh Kemenkes. Identifikasi kasus-kasus polio di tiga provinsi dan cakupan imunisasi rutin merupakan peringatan untuk semua provinsi untuk meningkatkan upaya mereka dalam mendorong para petugas untuk aktif mencari dan melaporkan kasus AFP, dengan fokus - pada penemuan kasus prioritas.

Langkah-langkah berikutnya

- Penilaian OBRA akan dilakukan pada 10–20 Juli di tingkat nasional dan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Jawa Barat. Tim OBRA terdiri dari pakar-pakar independen mitra Global Polio Eradication Initiative (GPEI).
- Kemenkes, dinkes provinsi, dan dinkes kabupaten/kota sedang memfinalisasi data/dokumen yang diperlukan, mengunggah dokumen-dokumen yang belum lengkap, mempersiapkan proses penilaian, dan menunjuk tim yang akan dilibatkan saat wawancara. Kemenkes dan dinkes provinsi telah mendorong kabupaten/kota yang merupakan *silent district* untuk melaporkan kasus AFP dan mencapai angka NP-AFP. Kabupaten/kota tersebut menjalankan lebih banyak kegiatan surveilans berbasis rumah sakit dan komunitas. Mereka juga memantau SKDR dan laporan manual rumah sakit secara berkala.
- Dikarenakan sasaran cakupan *crash program* polio belum tercapai, Sumatra Barat dan Riau sedang meningkatkan cakupan IPV dan bOPV dengan kampanye imunisasi kejar, yang akan diintegrasikan dengan layanan imunisasi rutin.
- Puskesmas melakukan kunjungan 60 hari untuk kasus-kasus dengan spesimen inadkuat, dan tim pakar polio menindaklanjuti memberikan klasifikasi pada kasus yang belum diklasifikasi.
- Setelah pelaksanaan OBRA selesai dilakukan di level Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit, dan Komunitas, maka akan disampaikan hasil dan rekomendasi selanjutnya.

Tautan relevan

- <http://polioeradication.org/>
- <https://www.who.int/indonesia/emergencies/polio-outbreak>

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:

**Kementerian Kesehatan:
Direktorat Pengelolaan
Imunisasi**

imunisasi.tamsus@gmail.com
survpd3i.kipi@gmail.com

WHO:

Dr Stephen Chacko
chackos@who.int

Dr Sudhir Joshi
joshisu@who.int

UNICEF:

Dr Gopinath Durairajan
gdurairajan@unicef.org

Dr Abdul Khalil Noorzad
aknoorzad@unicef.org